

RISALAH RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis/15 Juni 2017
Waktu : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : KPPIP
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas (RATAS) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur

Peserta : Sekretariat Kabinet;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Kementerian ESDM;
Kementerian ATR/BPN;
Kementerian Keuangan;
Kementerian Perhubungan;
Kementerian PUPR;
Kementerian PPN/Bappenas
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
Dinas Perhubungan Kalimantan Timur;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur;
PT PLN;

Tidak Hadir : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kedepuyan Bidang Koordinasi Infrastruktur)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)
Kementerian BUMN (Kedepuyan Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata)
PT Pertamina

Agenda Rapat : Pembahasan tindak lanjut RATAS PSN di Provinsi Kalimantan Timur

Pembahasan :

Jalan Tol Balikpapan - Samarinda

Kompensasi Kerohiman

Kemenko Bidang Perekonomian:

- Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional telah diterbitkan pada 2 Juni 2017.

Permohonan Izin Penyesuaian Trase Jalan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur:

- Terkait dengan tambahan kebutuhan lahan untuk trase jalan yang melewati Tahura Buki Soeharto (kurang lebih seluas 1.823.00 m²), Gubernur Kalimantan Timur telah mengirimkan surat kepada Menteri LHK No. 6050/245/LPISD pada tanggal 7 Mei 2017



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

untuk memohon agar Kementerian LHK dapat memberikan izin pemanfaatan untuk tambahan kebutuhan lahan tersebut. Secara lisan, arahan dari Kementerian LHK adalah menggunakan pola kolaborasi.

- Pada akhir bulan Juni 2017, UPTD Tahura Buki Soeharto ditargetkan untuk mengeluarkan pertimbangan teknis kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Selanjutnya, dalam waktu dua minggu setelah menerima pertimbangan teknis tersebut, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan mengeluarkan penelaahan teknis untuk diserahkan kepada Menteri LHK, untuk dijadikan rekomendasi terkait izin pemanfaatan trase jalan yang melewati Tahura Buki Soeharto.

Penggabungan Jembatan Tol Penajam Paser Utara (PPU)-Balikpapan, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Samarinda-Bontang

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur:

- BPJT menunggu kelengkapan dokumen persyaratan yang diperlukan dari PT Waskita Karya, sebagai pemrakarsa, untuk selanjutnya ditelaah lebih lanjut. Ditargetkan pada akhir bulan Juli, PT Waskita Karya akan menyelesaikan DED untuk Jembatan Tol PPU-Balikpapan.

Kemenko Bidang Perekonomian:

- Dalam menindaklanjuti usulan penggabungan proyek tersebut ke depannya, hal yang perlu diperhatikan adalah Jembatan Tol Penajam Paser Utara (PPU) Balikpapan dan Jalan Tol Samarinda-Bontang tidak termasuk ke dalam daftar PSN, sehingga pendanaan untuk pengadaan lahan untuk kedua proyek tersebut tidak dapat melalui LMAN. Hal ini berbeda dengan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda yang sudah masuk ke dalam daftar PSN, sehingga pendanaan pengadaan lahan dapat melalui LMAN.

Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur (KA Kaltim)

Tindak Lanjut Terhadap Investor Rusia

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur:

- Terkait dengan kemajuan pengembangan proyek, izin investasi untuk pembangunan rel KA Kaltim telah diterbitkan. PT Kereta Api Borneo (KAB) tengah membangun pelabuhan untuk kepentingan transportasi batu bara di Buluminung. Lahan yang telah dibebaskan kurang lebih adalah seluas 140 Ha. Lalu, Proses pengurusan AMDAL untuk pelabuhan masih dalam proses di komisi AMDAL.
- Kendala yang saat ini tengah dihadapi adalah belum ditetapkannya Kawasan Buluminung sebagai Kawasan Industri oleh Kementerian Perindustrian, sehingga investor ragu untuk berinvestasi pada Kawasan Buluminung tersebut.
- Investasi yang telah dikeluarkan oleh pihak Rusia adalah sekitar USD 38 Juta, untuk pembebasan lahan, pembangunan pelabuhan, dan lainnya.

Kementerian Perhubungan

- Pada bulan Maret 2017, Kementerian Perhubungan telah mengadakan pertemuan dengan PT KAB, dimana disampaikan bahwa isu yang masih dihadapi adalah ketidakpastian perubahan status dari Kereta Api Khusus menjadi Kereta Api Umum. PT KAB.
- Kementerian Perhubungan telah merevisi PP No. 56 Tahun 2009 menjadi PP No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagai salah satu upaya untuk mempermudah investasi di Perkeretaapian. Poin penting terkait pengembangan



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

KA Kaltim adalah pada perubahan Pasal 306, dimana penetapan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dapat dilakukan tanpa lelang, dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari Pemerintah. Kementerian Perhubungan telah menyampaikan poin ini kepada PT KAB, sehingga perubahan status KA Khusus menjadi KA Umum dapat dilakukan tanpa proses lelang.

- Terkait dengan perizinan, karena ini Perkeretaapian dalam satu provinsi, maka yang menetapkan perizinan adalah Gubernur.

Kemenko Bidang Perekonomian:

- KPPIP akan mengoordinasikan pertemuan dengan PT Kereta Api Borneo, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Kementerian Perhubungan untuk menyusun perjanjian dan Rencana Aksi yang rinci untuk menindaklanjuti pembangunan proyek.

Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy

Target Penyelesaian Pelabuhan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur:

- Pelabuhan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan akan dijadikan pelabuhan *multipurpose*, dimana rencana sebelumnya hanya sebagai pelabuhan curah. Kebutuhan pendanaan untuk menjadikan Pelabuhan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagai pelabuhan *multipurpose* kurang lebih mencapai Rp 200 Milyar. Dari hasil Musrebangnas, Kementerian Perhubungan hanya mengalokasikan Rp 50 Milyar untuk proyek ini. Dengan demikian, pencapaian target penyelesaian pada tahun 2017 akan sulit untuk dilakukan jika tidak terdapat penambahan pendanaan melalui APBN-P.
- Perlu diperhatikan bahwa status KEK untuk KEK Maloy akan dievaluasi pada Oktober 2017 dan diharapkan agar status KEK ini dapat diperpanjang.

Kemenko Bidang Perekonomian:

- Diperlukan pembahasan lanjutan dengan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan terkait dengan target penyelesaian Pelabuhan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Kilang Minyak Bontang

Pengajuan Proposal Pemanfaatan Lahan BMN dan Aset PT Badak NGL ke DJKN dan Kementerian Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur:

- Terkait dengan penyelesaian permasalahan kesesuaian tata ruang, Pemerintah Kota Bontang tengah menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai tahapan dalam peninjauan kembali dan revisi tata ruang Kota Bontang. Setelah KLHS selesai, tahapan selanjutnya adalah meminta rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Timur dan pengajuan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan revisi tata ruang Kota Bontang.

KPPIP

- Pembahasan secara rinci terkait permasalahan pada Kilang Minyak Bontang akan dibahas pada Rapat Komite KPPIP. Status kemajuan terkait Kilang Minyak Bontang,

termasuk persetujuan kerjasama pemanfaatan lahan dan aset BMN, diharapkan untuk disampaikan oleh PT Pertamina.

Program Ketenagalistikan

Analisis PLTU MT 1.000 MW untuk Kerjasama dengan Malaysia

Kementerian ESDM:

- Kementerian ESDM akan mengirimkan kajian terkait kebutuhan listrik dan ketersediaan mineral di Kalimantan Timur, serta potensi untuk dikerjasamakan dengan Malaysia, kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Selain itu, Kementerian ESDM akan mengklarifikasi terkait keberadaan rencana PLTU Mulut Tambang sebesar 1.000 MW di Kalimantan Timur di dalam RUPTL 2017 – 2026.

Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

Analisis Supply Gas untuk Penambahan Sambungan Gas Rumah Tangga

Kementerian ESDM:

- Status pelaksanaan arahan akan dilaporkan oleh Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas kepada Kemenko Bidang Perekonomian.

Bendungan Marangkayu (tidak terdapat arahan Presiden untuk proyek ini, namun dibahas dalam rapat)

Pembebasan Lahan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur:

- Dari kebutuhan lahan 615 Ha, luas lahan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah 143 Ha, sehingga masih terdapat kekurangan seluas 472 Ha untuk dibebaskan. Di dalam lahan yang belum dibebaskan tersebut, terdapat lahan dengan status HGU milik PT Perkebunan Nusantara (PN) XII seluas 281 Ha. Namun, walaupun telah berstatus HGU, masih terdapat klaim dari masyarakat di dalam lahan milik PT PN XIII tersebut. Diharapkan agar PT PN XIII dapat melepas HGU tersebut untuk kebutuhan lahan Bendungan Marangkayu. Gubernur Kalimantan Timur telah mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR terkait pengajuan permohonan agar pembiayaan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pengamanan 9 Sumur Migas milik PT VICO

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur:

- Gubernur Kalimantan Timur telah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM terkait permohonan dana untuk pengamanan 9 sumur migas milik PT VICO.

Bendungan Teritip (tidak terdapat arahan Presiden untuk proyek ini, namun dibahas dalam rapat)



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

Pembebasan Lahan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur:

- Kementerian PUPR telah menyanggupi untuk membiayai pembebasan lahan seluas 270 Ha pada area genangan dan zona penyangga.

Tindak Lanjut :

No	Proyek	Tindak Lanjut	Pelaksana	Target Pelaksanaan
1	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	1. Kemenko Bidang Perekonomian akan mendukung Pemprov Kalimantan Timur melakukan sosialisasi tentang Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 kepada pihak terdampak.	Kemenko Bidang Perekonomian; Pemprov Kalimantan Timur	<i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
		2. Menteri LHK agar dapat mengirimkan balasan surat kepada Gubernur Kalimantan Timur terkait izin pemanfaatan tambahan kebutuhan lahan untuk trase jalan yang melewati Tahura Buki Soeharto.	Menteri LHK	<i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
2	Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur	1. KPPIP akan mengoordinasikan pertemuan dengan PT Kereta Api Borneo, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Kementerian Perhubungan untuk menyusun perjanjian dan Rencana Aksi yang rinci untuk menindaklanjuti pembangunan proyek.	KPPIP	Juli 2017
3	Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy	1. Diperlukan pembahasan lanjutan dengan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan terkait dengan target penyelesaian Pelabuhan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; Pemprov Kalimantan Timur	<i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
4	Kilang Minyak Bontang	1. Pembahasan secara rinci terkait permasalahan pada Kilang Minyak Bontang akan dibahas pada Rapat Komite KPPIP.	KPPIP; PT Pertamina; Kementerian ESDM	21 Juni 2017



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

		Status kemajuan terkait Kilang Minyak Bontang, termasuk persetujuan kerjasama pemanfaatan lahan dan aset BMN, diharapkan untuk disampaikan oleh PT Pertamina.		
5	Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian ESDM akan mengirimkan kajian terkait kebutuhan listrik dan ketersediaan minerba di Kalimantan Timur, serta potensi untuk dikerjasamakan dengan Malaysia. Selain itu, Kementerian ESDM akan mengklarifikasi terkait keberadaan rencana PLTU Mulut Tambang sebesar 1.000 MW di Kalimantan Timur di dalam RUPTL 2017 – 2026.	Kementerian ESDM	30 Juni 2017
6	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	1. Status pelaksanaan arahan akan dilaporkan oleh Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas kepada Kemenko Perekonomian.	Kementerian ESDM	30 Juni 2017